

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROVINSI DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2014-2023

Satria Putra Darsumah, Airlangga Surya Kusuma, Laura Najwa Aulya,
Tanzila Keisha Namira, Ridho Surya Saputra, Nawila Salma Shakila

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: satriadrsmh@gmail.com, airlanggasuryak@upnvj.ac.id, lauranjwaz@gmail.com,
tanzila.keisha01@gmail.com, ridhosurya29@gmail.com, nawilashakshak@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten selama periode 2014-2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan regresi linear berganda berbasis data deret waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap UMP. Namun secara simultan, TPAK, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap UMP, dengan nilai R-squared sebesar 99,69%. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pengupahan minimum lebih dipengaruhi oleh kombinasi indikator makroekonomi secara keseluruhan dibandingkan oleh masing-masing variabel secara individu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pengupahan yang adil, responsif, dan berbasis kondisi ekonomi daerah.

Kata kunci: UMP, TPAK, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Labor Force Participation Rate (LFPR), Economic Growth, and Inflation on the Provincial Minimum Wage (UMP) in Banten Province during the period 2014-2023. A quantitative method was applied using multiple linear regression with time series data. The results show that individually, the three independent variables do not significantly affect UMP. However, collectively, LFPR, Economic Growth, and Inflation have a significant simultaneous effect, with an R-squared value of 99.69%. These findings highlight that minimum wage policy is shaped more by the combined dynamics of macroeconomic indicators rather than by each factor in isolation. The study is expected to contribute to the formulation of more equitable, responsive, and regionally adaptive wage-setting policies.

Keywords: Minimum Wage, LFPR, Economic Growth, Inflation.

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 775
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem ketenagakerjaan nasional, kebijakan upah minimum memiliki peran sentral sebagai alat perlindungan sosial sekaligus stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Upah minimum menjadi standar dasar yang menjamin bahwa pekerja memperoleh imbalan kerja yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka, terutama bagi kelompok pekerja dengan keterampilan rendah dan posisi tawar yang lemah. Instrumen ini juga berfungsi menjaga stabilitas hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Di Indonesia, kebijakan pengupahan diatur dalam kerangka regulatif seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan variabel ekonomi makro dan kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Di tengah tantangan ketimpangan pendapatan dan produktivitas regional yang masih tinggi, upah minimum provinsi (UMP) menjadi salah satu instrumen yang paling responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi daerah. Namun, dalam praktiknya, penetapan UMP kerap menjadi perdebatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Seiring waktu, penyesuaian UMP tidak selalu sejalan dengan perubahan indikator ekonomi makro maupun kondisi pasar tenaga kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai keefektifan formulasi penetapan UMP dalam mencerminkan realitas ekonomi di tiap provinsi.

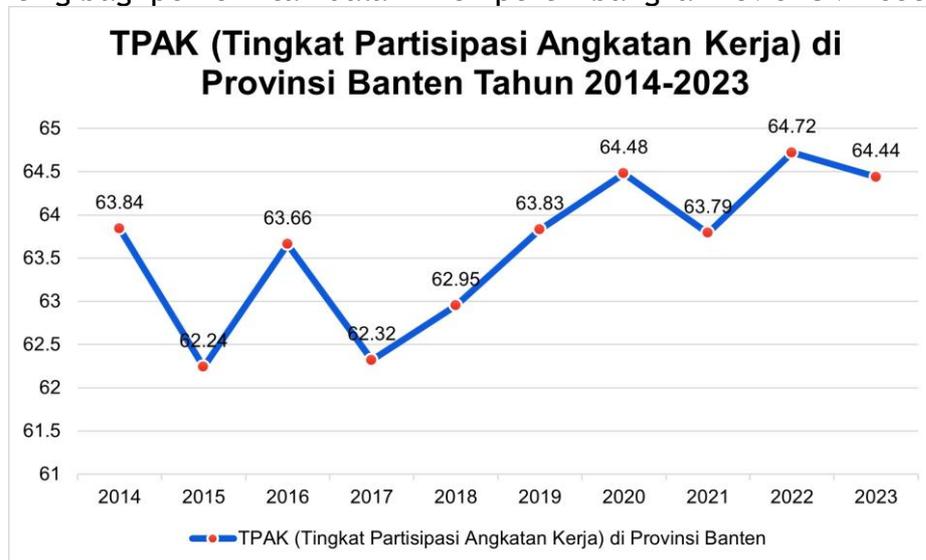
Secara khusus, di Provinsi Banten, UMP terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2014 hingga 2023, dari Rp1.325.000 pada 2014 menjadi Rp2.661.280 pada 2023. Meskipun terdapat peningkatan nominal yang konsisten, terdapat dinamika menarik yang patut diperhatikan, khususnya ketika pada tahun 2021 – saat ekonomi masih terdampak pandemi – UMP tidak mengalami kenaikan, tetap pada level Rp2.460.996. Fenomena ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti stabilitas ekonomi, tekanan inflasi, serta kapasitas dunia usaha memengaruhi kebijakan upah minimum secara kompleks.



Gambar 1. UMP (Upah Minimum Provinsi) di Provinsi Banten

Salah satu variabel yang turut membentuk dinamika pengupahan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mencerminkan seberapa besar jumlah penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja. Perubahan TPAK dapat memengaruhi ketersediaan tenaga kerja dan daya tawar pekerja dalam proses negosiasi upah. Peningkatan partisipasi angkatan kerja akan menciptakan tekanan tambahan terhadap pasar tenaga kerja dan berpotensi mempengaruhi struktur upah di sektor formal maupun informal (Ehrenberg & Smith, 2017). Data TPAK Provinsi Banten menunjukkan fluktuasi selama satu dekade terakhir, berkisar antara 62,24% pada 2015 hingga mencapai 64,72% pada 2022, yang menunjukkan dinamika masuk-keluarnya penduduk usia kerja ke pasar tenaga kerja seiring perubahan struktural ekonomi dan demografi.

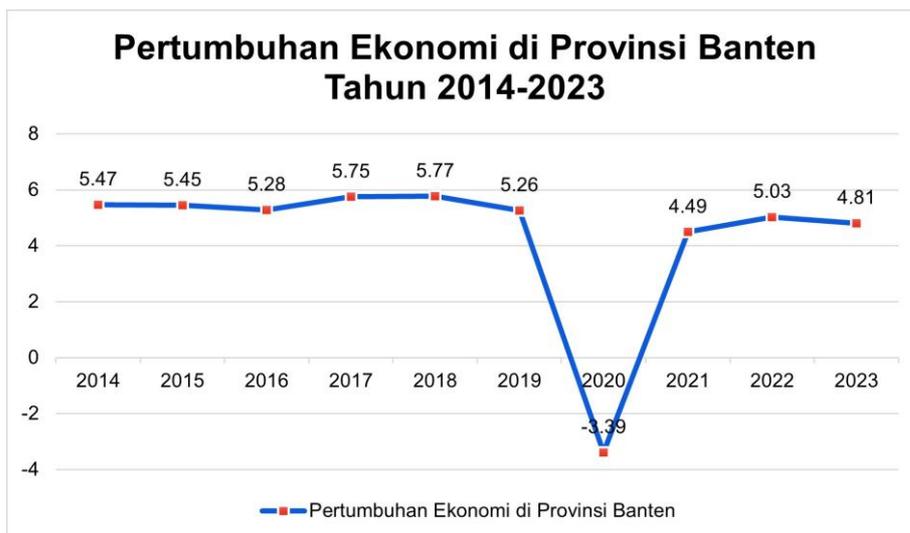
Hubungan antara TPAK dan UMP di Provinsi Banten tampak cukup menarik. Misalnya, ketika TPAK mengalami peningkatan signifikan pada 2022, hal ini diikuti dengan kenaikan UMP yang cukup tinggi pada tahun berikutnya. Peningkatan TPAK menandakan bertambahnya jumlah tenaga kerja potensial yang aktif, sehingga mendorong perlunya kebijakan upah yang lebih kompetitif untuk menjaga produktivitas dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, TPAK dapat menjadi sinyal penting bagi pemerintah dalam mempertimbangkan revisi UMP secara periodik.



Gambar 2. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) di Provinsi Banten

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi memiliki relevansi kuat terhadap kebijakan pengupahan. Dalam teori ekonomi klasik, peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan membaiknya kapasitas produksi dan pendapatan nasional, yang berimplikasi pada kenaikan permintaan tenaga kerja dan kemampuan perusahaan dalam membayar upah lebih tinggi. Mankiw (2018) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi dasar dari kenaikan upah riil jangka panjang karena mencerminkan kenaikan produktivitas tenaga kerja. Provinsi Banten menunjukkan tren pertumbuhan positif pada sebagian besar periode, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -3,39% akibat dampak pandemi. Namun menariknya, UMP tetap meningkat pada tahun tersebut. Ini mencerminkan bahwa penetapan upah minimum tidak semata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan stabilitas sosial dan keberlanjutan konsumsi rumah tangga.

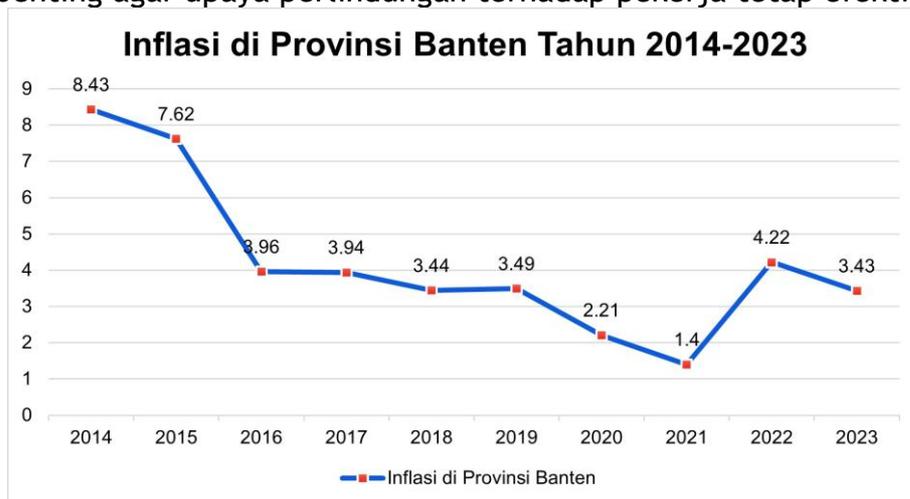
Walaupun terdapat pola umum bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh kenaikan UMP, seperti pada tahun 2018 dan 2023, namun tidak selalu hubungan ini berlangsung linear. Tahun 2020 menjadi anomali ketika UMP tetap naik meski ekonomi berkontraksi, menandakan bahwa aspek sosial-politik dan kebutuhan menjaga daya beli masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam kebijakan pengupahan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting, variabel ini perlu dilihat bersama indikator lainnya untuk memperoleh gambaran menyeluruh.



Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten

Selanjutnya, Inflasi juga menjadi variabel kunci yang tidak dapat diabaikan dalam konteks upah minimum. Inflasi yang tinggi menyebabkan turunnya daya beli pekerja apabila tidak diimbangi dengan kenaikan upah yang proporsional. Ketidaksesuaian antara upah minimum dan inflasi akan berdampak negatif terhadap konsumsi dan kesejahteraan pekerja miskin, yang cenderung tidak memiliki tabungan atau akses terhadap proteksi sosial lainnya (Alatas & Cameron, 2008). Di Banten, tingkat inflasi sempat mencapai angka tinggi 8,43% pada 2014, namun melandai menjadi 1,4% pada 2021, sebelum kembali meningkat ke 4,22% pada 2022. Kenaikan inflasi pada tahun-tahun terakhir menimbulkan tekanan terhadap pemerintah daerah untuk menyesuaikan UMP agar tidak terjadi erosi daya beli.

Ketika inflasi meningkat secara signifikan, terutama pada 2014 dan 2022, pemerintah merespons dengan menaikkan UMP untuk menyesuaikan dengan biaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki peran langsung dalam proses penentuan upah minimum, terutama sebagai ukuran untuk mempertahankan keseimbangan antara upah nominal dan riil. Oleh sebab itu, dalam merumuskan kebijakan pengupahan, menjaga sinkronisasi antara inflasi dan UMP menjadi penting agar upaya perlindungan terhadap pekerja tetap efektif.



Gambar 4. Inflasi di Provinsi Banten

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif bagaimana pengaruh TPAK, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap UMP di Provinsi Banten selama periode 2014 hingga 2023. Hasil dari studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi ketenagakerjaan di Indonesia, serta menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menyusun kebijakan pengupahan yang adil dan berkelanjutan, sejalan dengan dinamika ekonomi lokal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten pada periode 2014-2023?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten pada periode 2014-2023?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten pada periode 2014-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten selama periode 2014-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten selama periode 2014-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten selama periode 2014-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari beberapa uraian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Akademis:
Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi ketenagakerjaan, khususnya dalam konteks regional, dengan menghadirkan analisis empiris mengenai pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji dinamika pengupahan di tingkat provinsi.
- Praktis:
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah, pengambil kebijakan, serta pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan dan perencanaan ekonomi regional. Dengan memahami faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi UMP, penyusunan kebijakan pengupahan dapat dilakukan secara lebih adaptif, responsif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Provinsi Banten.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kaitan Teori Upah Minimum dengan Indikator Makroekonomi

Teori Ekonomi Ketenagakerjaan

Teori ekonomi ketenagakerjaan merupakan bagian dari cabang ilmu ekonomi mikro yang fokus membahas perilaku dan interaksi antara pelaku pasar tenaga kerja, yaitu pekerja (penyedia tenaga kerja) dan perusahaan (pengguna tenaga kerja). Dalam kerangka dasar teori ini, pasar tenaga kerja beroperasi seperti pasar barang dan jasa lainnya, di mana tingkat upah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Apabila permintaan terhadap tenaga kerja meningkat lebih cepat dibandingkan penawaran, maka akan terjadi tekanan ke atas terhadap tingkat upah. Sebaliknya, jika terjadi surplus tenaga kerja—misalnya

akibat tingginya angka pengangguran terbuka—maka tingkat upah cenderung stagnan atau bahkan menurun.

Namun, teori ini juga mengakui bahwa pasar tenaga kerja tidak bersifat sempurna. Intervensi pemerintah, keberadaan serikat buruh, serta rigiditas struktural dalam ekonomi menyebabkan pasar tenaga kerja tidak selalu mencapai keseimbangan yang efisien secara alami. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan upah minimum untuk memastikan adanya perlindungan terhadap pekerja, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi tawar rendah. Dalam konteks ini, UMP menjadi salah satu alat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, mendorong pemerataan ekonomi, dan menjaga stabilitas sosial. Teori ini penting dalam membongkar analisis pengaruh berbagai faktor makroekonomi terhadap UMP di Provinsi Banten.

2.2 Teori-Teori yang Berkaitan dengan Variabel Independen

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting dalam analisis pasar kerja karena mencerminkan seberapa banyak penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Dalam perspektif teori penawaran tenaga kerja, TPAK dianggap sebagai proksi jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar. Ketika TPAK meningkat, berarti semakin banyak orang yang masuk ke pasar tenaga kerja dan siap untuk bekerja. Secara teoritis, apabila permintaan tenaga kerja tidak tumbuh secepat kenaikan TPAK, maka akan terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja yang menyebabkan tekanan terhadap tingkat upah, termasuk UMP.

Lebih lanjut, TPAK juga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan demografis. Misalnya, peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja, perubahan struktur keluarga, hingga peningkatan pendidikan formal dapat berkontribusi terhadap naiknya TPAK. Namun demikian, peningkatan ini bisa menjadi pedang bermata dua: jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup, maka kenaikan TPAK justru dapat memperburuk pengangguran terbuka dan memperlemah daya tawar buruh terhadap pengusaha, sehingga memperlambat laju peningkatan UMP. Dalam studi ini, TPAK dianalisis sebagai salah satu determinan penting yang dapat memengaruhi tingkat UMP di Provinsi Banten dari tahun 2014 hingga 2023.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu daerah atau negara dalam menghasilkan barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat provinsi. Teori pertumbuhan ekonomi, baik dalam pendekatan klasik maupun neoklasik, mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu mekanisme terpenting dalam teori ini adalah hubungan antara produktivitas dan pendapatan: semakin tinggi produktivitas, semakin tinggi pula potensi pendapatan, termasuk upah pekerja.

Dalam kaitannya dengan UMP, pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar dan mendorong mereka untuk menaikkan upah. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum tentu menjamin peningkatan UMP jika tidak bersifat inklusif. Hal ini sering terjadi di daerah yang pertumbuhannya didominasi oleh sektor padat modal atau sektor non-tradable yang tidak menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penting untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten selama 2014-2023 berdampak langsung terhadap penetapan UMP, atau justru pertumbuhan tersebut belum mampu diterjemahkan ke dalam kenaikan kesejahteraan tenaga kerja.

Inflasi (Indeks Harga Konsumen/IHK)

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi makro yang mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, termasuk tenaga kerja, apabila tidak diimbangi dengan kenaikan upah nominal yang sepadan. Dalam hal ini, teori upah riil menjadi sangat relevan: kesejahteraan pekerja tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya upah nominal yang diterima, tetapi juga oleh seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan tersebut. Maka dari itu, IHK (Indeks Harga Konsumen) digunakan sebagai indikator utama untuk menyesuaikan UMP agar tetap selaras dengan kebutuhan hidup minimum.

Kondisi inflasi yang tinggi, apabila tidak segera ditanggapi dengan kebijakan pengupahan yang adaptif, dapat memperbesar kesenjangan antara upah dan harga-harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, dalam banyak kebijakan penetapan upah minimum di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten, pemerintah menjadikan inflasi sebagai variabel penting dalam formula penghitungan UMP. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja tetap mampu mempertahankan taraf hidupnya di tengah tekanan harga yang meningkat. Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap pengaruh inflasi terhadap UMP akan membantu menilai seberapa efektif peran pemerintah dalam menjaga daya beli buruh selama satu dekade terakhir.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. H1: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten.
2. H2: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten.
3. H3: Inflasi (yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen/IHK) berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari CEIC, Badan Pusat Statistik (BPS), serta website Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Variabel yang dianalisis mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk Domestik Bruto (GDP), dan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Banten selama rentang waktu 2014 hingga 2023.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Namun, penelitian ini hanya mengambil sampel provinsi baru, yakni Provinsi Banten dan data yang tersedia secara konsisten sepanjang periode pengamatan Teknik purposive sampling diterapkan dalam pemilihan provinsi berdasarkan ketersediaan serta kelengkapan data selama sepuluh tahun.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan pendekatan deret waktu. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linear berganda dipilih karena penelitian ini melibatkan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Tahapan analisis data dalam penelitian ini secara khusus meliputi:

1. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model penelitian yang digunakan tidak mengalami pelanggaran terhadap asumsi-asumsi dasar. Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah model tersebut baik untuk digunakan. Untuk memenuhi kriteria ini, model harus memenuhi asumsi klasik. Beberapa uji yang termasuk dalam uji asumsi klasik antara lain adalah sebagai berikut (Ghozali & Ratmono, 2013):

A. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan agar data dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Hasil nilai probabilitas yang diperoleh menjadi dasar dalam menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Interpretasi normalitas dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika Nilai $P > \alpha$ maka model terdistribusi normal.
2. Jika Nilai $P < \alpha$ maka model tidak terdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terindikasi ketika ada hubungan linier antar variabel bebas dalam model regresi. Tujuannya adalah mengevaluasi apakah ada korelasi signifikan di antara mereka. Jika korelasi antar variabel independen melebihi 0.90, model regresi dianggap mengalami multikolinearitas. Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga bisa digunakan untuk menilai keberadaannya.. Jika nilai VIF melebihi 10, ini menandakan adanya masalah multikolinearitas dalam data yang diteliti (Ghozali & Ratmono, 2013).

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan dalam varian residual observasi dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Jika nilai residual tetap dari satu pengamatan ke pengamatan lain, maka model regresi dianggap homoskedastis. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan nilai residual antar pengamatan, maka model dianggap heteroskedastis. Dalam uji ini, jika nilai probabilitas dari uji chi-square lebih besar dari nilai alpha, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas dari uji chi-square lebih kecil dari nilai alpha, maka model dianggap mengalami masalah heteroskedastisitas (Ghozali & Ratmono, 2013).

D. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menilai apakah ada hubungan antara residual suatu observasi dengan residual observasi lainnya dalam model regresi. Ini mengidentifikasi korelasi kesalahan pada periode waktu yang sama dengan periode sebelumnya, atau antar *cross-section* pada waktu yang sama. Jika ada korelasi, model mengalami autokorelasi. Dengan tes Wooldridge, jika nilai probabilitas F-test lebih besar dari alpha, disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas dari F-test lebih kecil dari nilai alpha, maka model dianggap mengalami masalah autokorelasi (Ghozali & Ratmono, 2013).

2. Uji Signifikansi

Uji signifikansi adalah bagian penting dari penelitian kuantitatif. Ini bertujuan dalam mengukur seberapa signifikan pengaruh koefisien masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen. Uji ini menggunakan analisis regresi berganda dan dipresentasikan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

A. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung terhadap t tabel, di mana H_0 ditolak jika nilai t hitung lebih besar dari t/z tabel dan nilai probabilitas kurang dari 5%. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas pada uji J-B lebih besar dari tingkat signifikansi α (0,05), maka data dianggap berdistribusi normal.
- b. Jika nilai probabilitas pada uji J-B lebih kecil dari α (0,05), maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

B. Uji Statistik F

Pengujian ini mempunyai tujuan dalam menentukan apakah seluruh variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model dengan simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Uji F dilangsungkan melalui cara mengkomparasikan hasil F hitung dengan F tabel atau menggunakan nilai probabilitas signifikannya sebagai basis penentuan keputusan pada tingkat kepercayaan sebesar $\alpha = 5\%$, melalui ketentuan apabila nilai F hitung $> F$ tabel atau probabilitas $< \alpha = 5\%$, diputuskan H_0 ditolak yang mengindikasikan kalau variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.

C. Koefisien Determinasi (R^2) dan *Adjusted R-Squared*

Koefisien determinasi (R-squared) menunjukkan seberapa baik variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen (nilai 0-1). Semakin mendekati 1, semakin baik penjelasannya. Namun, R-squared bisa bias dan meningkat seiring penambahan variabel, bahkan yang tidak relevan. Oleh karena itu, *Adjusted R-squared* lebih disarankan karena lebih akurat dan tidak selalu meningkat saat variabel baru ditambahkan ke model regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Adj chi2(2)	1.43
Prob>chi2	0.4893

Sumber: Hasil olah data STATA 17

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai *P-Value* yaitu sebesar (0.4893) > 0.05 . Jika merujuk pada kaidah keputusan uji normalitas, maka residual model pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan jika residual terdistribusi normal atau bebas masalah normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
LNUMP	4.74
INFLASI	3.70
TPAK	1.95
PE	1.35

Sumber: Hasil olah data STATA 17

Tabel 2 menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel tidak melebihi 10. Artinya, model yang digunakan pada penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

chi2(1)	0.16
Prob > chi2	0.6935

Sumber; Hasil olah data STATA 17

Berdasarkan Tabel 3, Dari hasil uji *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai *P-Value* sebesar (0.834264) > 0.05, sehingga dapat ditarik kesimpulan kalau tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas pada data.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

chi2	2.336
Prob > chi2	0.1264

Sumber: Hasil olah data STATA 17

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat pada hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan hasil nilai *P-Value* dari uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* yaitu sebesar (0.1264) > 0.05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan autokorelasi.

Model Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Model Regresi Linear Berganda

LNUMP	Coefficient	Std. Error	t	P>[t]
TPAK	-.0164959	.0090054	-1.83	0.126
PE	.0004581	.0023588	0.19	0.854
INFLASI	-.0086123	.0049152	-1.75	0.140
C	14.57768	.5388162	27.06	0.000

Sumber: Hasil olah data STATA 17

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat hasil pengujian regresi linear berganda dengan pengelolaan data *time series* diatas, menunjukkan memiliki persamaan sebagai berikut:

$$LNUMP = 14.5777 - 0.0165 \text{ TPAK} + 0.0004 \text{ PE} - 0.0086 \text{ INFLASI}$$

Dari hasil persamaan diatas yang telah dihasilkan, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 14.5777 yang menunjukkan bahwa jika variabel independen yang mencakup TPAK, PE dan INFLASI dianggap tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan, maka nilai dari variabel UMP mengalami kenaikan sebesar 14.5777.
- Nilai koefisien regresi variabel TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 0.0165 artinya apabila terdapat perubahan pada nilai variabel TPAK sebesar satu satuan, maka nilai UMP akan menurun sebesar 0.0165.
- Nilai koefisien regresi variabel PE atau Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.0004 artinya apabila terdapat perubahan pada nilai variabel PE sebesar satu satuan, maka nilai UMP akan meningkat sebesar 0.0004.
- Nilai koefisien regresi variabel INFLASI sebesar 0.0086 artinya apabila terdapat perubahan pada nilai variabel INFLASI sebesar satu satuan, maka nilai UMP akan menurun sebesar 0.0086.

4.2. Uji Signifikansi

Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel	t	P>[t]
TPAK	-1.83	0.126
PE	0.19	0.854
INFLASI	-1,75	0.140

Sumber: Hasil olah data STATA 17

Berdasarkan tabel 6, hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Hasil regresi variabel TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan nilai t hitung sebesar $(-1.83) < t_{\alpha/2(df=10-2)} (0.63)$. Nilai probabilitas dari variabel TPAK sebesar $0.126 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP).
- Hasil regresi variabel PE atau Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai t hitung sebesar $(0.19) < t_{\alpha/2(df=10-2)} (0.63)$. Nilai probabilitas dari variabel PE sebesar $0.854 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP).
- Hasil regresi variabel INFLASI menunjukkan nilai t hitung sebesar $(-1.75) < t_{\alpha/2(df=10-2)} (0.63)$. Nilai probabilitas dari variabel INFLASI sebesar $0.140 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa variabel INFLASI tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP).

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

F (4, 5)	405.77
Prob > F	0.000

Sumber: Hasil olah data STATA 17

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat nilai F hitung sebesar $(405.77) > F \text{ tabel } (4.35)$ dengan nilai probabilitas $0.000 < 0.05$ dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK), Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP).

Uji *R-Squared* dan *Adjusted R-Squared*

Tabel 8. Hasil Uji *R-Squared* & *Adjusted R-Squared*

R-squared	0.9969
Adj R-squared	0.9945

Sumber: Hasil olah data STATA 17

Berdasarkan Tabel 8. nilai *R-squared* model menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam penelitian ini sebesar 99,69%, dan sebesar 0.31% dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian ini. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 99,45% menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas dalam penelitian ini sebesar 99,45%, dan sebesar 0,55% dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian ini.

4.3. Pembahasan

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap UMP

Hasil regresi menunjukkan bahwa TPAK memiliki nilai *t* hitung -1.83, dan *P-Value* sebesar $0.126 > (0.05)$, yang berarti tidak signifikan secara statistik. Secara ilmiah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja yang aktif di pasar kerja tidak serta merta mempengaruhi kebijakan penetapan UMP secara langsung. Secara umum, TPAK yang tinggi mencerminkan ketersediaan tenaga kerja yang banyak secara agregat, namun dalam pasar tenaga kerja yang cenderung *oversupply* atau belum terserap optimal dapat berimbas kepada daya tawar buruh terhadap upah menjadi lemah. Jika penciptaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja, maka peningkatan TPAK tidak menekan pemerintah atau pelaku usaha untuk menaikkan UMP, karena masih banyak tenaga kerja yang bersedia bekerja dengan upah minimum. Dalam kondisi seperti ini, peningkatan partisipasi kerja justru dapat menahan pertumbuhan upah.

Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap UMP

Hasil regresi menunjukkan nilai *t* hitung 0.19 dan *P-Value* sebesar $0.854 > (0.05)$, yang juga berarti tidak signifikan secara statistik terhadap UMP. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis diterjemahkan dalam kenaikan upah minimum. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi biasanya mencerminkan peningkatan output nasional, produktivitas, dan potensi peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif atau berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Seringkali, pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok kapitalis atau sektor tertentu (misalnya sektor padat modal, bukan padat karya), sehingga tidak terjadi *trickle down effect* yang cukup kuat untuk mendorong peningkatan UMP.

Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap UMP

Hasil regresi menunjukkan nilai *t* hitung -1.75 dan *P-Value* sebesar $0.140 > (0.05)$, yang berarti tidak signifikan secara statistik. Secara logika, hal ini mungkin tampak bertentangan dengan asumsi bahwa inflasi seharusnya mendorong kenaikan UMP untuk menjaga daya beli pekerja. Namun, perlu dicermati bahwa meskipun secara teoritis kenaikan inflasi mendorong penyesuaian UMP agar tidak terjadi penurunan kesejahteraan pekerja, dalam praktiknya, penetapan UMP tidak selalu langsung merespons angka inflasi, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil yang didasari faktor kondisi sosial politik, kebutuhan hidup layak (KHL), dan

tekanan dari pengusaha yang mempertahankan keberlanjutan bisnis usahanya juga ikut mempengaruhi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten selama periode 2014-2023. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode regresi linear berganda, hasil menunjukkan bahwa secara parsial, ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap UMP. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi masing-masing indikator ekonomi secara individu belum cukup kuat memengaruhi perubahan UMP dari tahun ke tahun.

Namun secara simultan, TPAK, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap UMP, dengan nilai R-squared sebesar 99,69%. Ini mengindikasikan bahwa penetapan UMP di Provinsi Banten selama satu dekade terakhir lebih dipengaruhi oleh kombinasi ketiga variabel tersebut secara bersamaan, bukan oleh satu indikator tunggal.

Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pengupahan minimum merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor makroekonomi. Oleh karena itu, penetapan UMP sebaiknya mempertimbangkan dinamika ekonomi secara menyeluruh untuk menciptakan kebijakan yang adil dan relevan dengan kondisi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, V., & Cameron, L. A. (2008). The Impact of Minimum Wages on Employment in a Low-Income Country: A Quasi-Natural Experiment in Indonesia. *ILR Review*, 61(2), 201-223. <https://doi.org/10.1177/001979390806100204>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *PP No. 36 Tahun 2021*. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (persen), 2024 - Tabel Statistik*. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSeIJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2023.html?year=2023>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2024). *Upah Minimum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten - Tabel Statistik*. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDkxlzl=/upah-minimum-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2025a). *Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Bulan di Provinsi Banten - Tabel Statistik*. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5lzl=/inflasi-tahun-ke-tahun-menurut-bulan-di-provinsi-banten.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2025b). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten - Tabel Statistik*. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU2lzl=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- Ehrenberg, R. G., & Smith, R. (2017). *Modern Labor Economics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315101798>
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (10th ed.). Cengage Learning.